

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Ashafa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Fuady, Munir, 2005, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan : Rapat-Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartini, Rahayu, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad, 2004, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2010, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Teori Dan Praktik: Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, PT Alumni, Bandung.

Nugroho, Susanti Adi, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.

Pramono, Nindy, dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila-Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Sawir, Agnes, 2004, *Kebijakan Pendanaan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suyatno, R. Anton, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Kencana, Yogyakarta.
- Sinaga, Syamsudin Manan, 2004, *Hukum Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surowidjojo, Arief T., 2005, *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi Prosiding Rangkaian Lakakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, 2004, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia : Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Sleman.
- Wijayanta, Tata, dan Muhammad Bagas Amirul Haq, 2021, *Cross Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Gadjah Mada University Press, Sleman.
- Wijayanta, Tata, dan Sheva Trisanda Adistia, 2023, *Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Publik*, Gadjah Mada University Press, Sleman.

Jurnal

- Aditya, Tjokorda Agung Candra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)",

Dharmasisya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 1549-1558.

Adistia, Sheva Trisanda, dan Tata Wijayanta, “Eksistensi Harta Peninggalan Semarang sebagai Pengurus dan Pemberes Harta Pailit”, *Jurnal Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 341-353, DOI [02/12/2022] <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.77537> [25/03/2024].

Andani, Devi, dan Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman, Vol. 28, No. 3, 2021, hlm. 635-656, DOI [25/08/2021] <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9> [28/12/2023].

Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya, “Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor”, *Media Bhakti*, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 46 – 56.

Christiawan, Rio, "Kekuatan Perjanjian Homologasi Terhadap Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis", *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial, Jakarta, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 99-119.

Damayanti, Retno, Parlin Sahat Ivandamme Pasaribu, Nyulistiowati Suryanti, dan Deviana Yuanitasari, “Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Mencegah Pailit”, *Jurnal Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 128 – 143.

Hidayat, Agitha Putri Andany, dan Anita Afriana, “Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 19 – 36.

Irianto, Catur, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 399 – 418.

K., Andriansyah Tiawarman, “Restatement Asas On Going Concern Melalui Pengaturan Debtthreshold Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia”, *Syntax Literate*, Vol. 7, No. 5, 2022, hlm. 5682 – 5693.

- Leonard, Tommy, dan Yolanda C. Irianda Panjaitan, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Iblam Law Review*, Iblam School of Law, Jakarta, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 499 – 514.
- Leonardus, Rado Fridsel, Alexander Yovie Pratama Yudha, dan Tata Wijayanta, “ Practice of Applying Affidavits in Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations”. *Unnes Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 467 – 488.
- Martam, Nurmin K., “Tinjauan Yuridis Tentang Rechtsvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Putera Batam, Batam, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 40–59.
- Mubaroq, Ali Husaen, “Analisis Yuridis Urgensi Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Syarat Permohonan Pailit”, *Jurnal Hukum : Egalitaire*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 127–143 .
- Patrik, Delvis, Nyulistiowati Suryanti, dan Aam Suryamah, “Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Media Juris*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 397 – 418, DOI [27/10/2021] <https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.27478> [17/02/2024].
- Rokilah, dan Sulasno, “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmu Hukum: Ajudikasi*, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 179 – 190.
- Simalango, Maruli, “Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia”, *Syarik Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Bandung, Vol. 15, No. 1, 2017, hlm. 53 – 64.
- Simanjutak, Herry Anto, “Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitor kepada Kreditor”, *Jurnal Justika*, Fakultas Hukum Universitas Quality, Medan, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 17 – 28.
- Sari, Eva Puspita, dan Evi Kongres, “Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021”,

Jurnal Hukum Magnum Opus, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 1 – 13.

Wijayanta, Tata, Sheva Trisanda Adistia, Rado F. Leonardus, B.E Hermawan, “Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore’s Cross-Border Insolvency Asset Settlements?”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 27 – 37.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 216-226, DOI [25/05/2014] <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291> [20/05/2024].

Wijayanta, Tata, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 22, No. 2, 2010, hlm. 330-346.

Wijayanta, Tata, dan Sheva Trisanda Adistia, “Development Of The Heritage Center As Bankruptcy Curator”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 1– 18.

Wijayanta, Tata, Sheva Trisanda Adistia, Rado F. Leonardus, dan B.E.Hermawan, “Evaluation Study of the Chancery Court (Balai Harta Peninggalan) as a Bankruptcy Curator”, *Pandecta Research Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 18, No. 2, 2023, hlm. 300 – 324.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1848 – 23)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 268/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. perihal permohonan pengesahan perdamaian (homologasi) antara PT GPP terhadap PT APA, 17 Maret 2020.

Laporan Tugas Akhir

Hermawan, B. E., 2017, Studi Tentang Pembatalan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Diajukan Oleh Bank Pemerintah Terhadap Perusahaan Swasta Dikarenakan Perbedaan Penafsiran Dan Isi Persepsi Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disepakati Dan Telah Dihomologasikan Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

Kartika, 2009, Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT Argo Pantes, Tbk. dalam Perkara Kepailitan, *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Salam, Rizki Hafiz, 2023, Tinjauan Yuridis Syarat-Syarat Perdamaian Dalam Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kaitannya Dengan Keadilan Dan Kepastian Pemenuhan Piutang Kreditor, *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Timotius, Naskel Thiopulus Baharsyah, 2021, Analisis Perbandingan Putusan Hakim Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tentang Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Perdamaian Ditinjau Dari Pasal 281 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Mdn. Dan Putusan No. 119/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst), *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

Pidato

Tata Wijayanta, “Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan: Peluang Dan Tantangan”, Pidato, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23 April 2024.

Internet

Anjarsari, Lulu. “Pemerintah: UU PKPU Memberikan Keadilan Terhadap Debitor dan Kreditor”. [21/02/2014], <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9642>, [13/02/24].

Arthaluher, Made Wahyu. “Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap” [24/05/2018], <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ade9a469d120/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap>, [22/06/2024].

Hukumonline.com. “Indonesia Tidak Bisa Anut Insolvency Test” [29/08/2022], <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-tak-bisa-anut-insolvency-test-lt521f1b9bec281/>, [29/06/2024].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata”, [18/05/2011] <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, [03/09/2024].

Wahyuni, Willa, “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum” [08/05/2023] <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsijurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=2> [15/02/2024].